

Pergerakan PNI Baru Menentang Ordonansi Sekolah Liar Tahun 1932-1933

Ilham Nur Utomo;¹ Sulistya Putri²

¹UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, ²MAN 1 Jepara,
Email : inurutomo@uinsaizu.ac.id¹, 123456789sulis@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pergerakan PNI Baru dalam menentang Ordonansi Sekolah Liar yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1932. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang mencakup empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Ordonansi Sekolah Liar secara resmi diberlakukan pada 1 Oktober 1932, yang memberi kewenangan kepada pemerintah kolonial untuk mengawasi dan mengeluarkan keputusan terhadap sekolah-sekolah partikelir yang dianggap memberikan pengajaran tidak representatif dan menyemai benih-sbenih nasionalisme. PNI Baru dalam menentang Ordonansi Sekolah Liar berfokus pada tiga cara, yaitu melalui tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam majalah internal PNI Baru, menggelar rapat umum, dan melakukan aksi protes secara terbuka bersama dengan organisasi nasionalis lainnya. Selain itu, PNI Baru memberikan dukungan terhadap pergerakan Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai pendiri Taman Siswa dan tokoh penting dalam gerakan menentang Ordonansi Sekolah Liar. Aksi-aksi penentangan yang terus disuarakan pada akhirnya berhasil mendorong pemerintah kolonial mencabut pemberlakuan Ordonansi Sekolah Liar pada 13 Februari 1933.

Kata Kunci : PNI Baru; Ordonansi Sekolah Liar; Pergerakan Nasional Indonesia.

Abstract

This research aimed to find out the movement of PNI Baru in opposing the Wild School Ordinance issued by the colonial government in 1932. The method used in this research was the historical method. It consists of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography stages. The Wild School Ordinance was officially enacted on October 1, 1932. It gave the colonial government the authority to monitor and issue decisions on private schools deemed to provide unrepresentative teaching and sow the seeds of nationalism. PNI Baru in opposing the Wild School Ordinance focused on three ways; through writings published in the PNI Baru internal magazine, holding public meetings, and conducting open protests together with other nationalist organizations. Besides, the PNI Baru gave support to the movement of Ki Hajar Dewantara, who is known as the founder of Taman Siswa and an important figure in the movement against the Wild School Ordinance. Opposition actions that continued to be conducted in the end succeeded in encouraging the colonial government to revoke the implementation of the Wild School Ordinance on February 13, 1933.

Keywords : PNI Baru; Wild School Ordinance; Indonesian National Movement.

A. Pendahuluan

Pendidikan di Hindia Belanda pada awal abad XX, mengalami perkembangan ke arah keterbukaan terhadap bumiputra, meskipun cenderung terlihat samar. Salah satu katalisator perkembangan tersebut adalah diberlakukannya sistem politik etis yang berfokus pada perbaikan irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Pendidikan kolonial yang dapat diakses oleh bumiputra memunculkan suatu dorongan kepada bumiputra untuk mendidik bangsa sendiri melalui insititusi pendidikan yang didirikan secara mandiri. Dasar pemikiran tersebut melahirkan sekolah-sekolah partikelir yang didirikan dan dikelola oleh tokoh-tokoh pendidikan bumiputra. Sedikit contohnya adalah Taman Siswa yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dan Sakola Istri yang diinisiasi oleh Dewi Sartika. Atas dasar tersebut, pendidikan pada masa kolonial terbagi menjadi dua, yaitu sekolah kolonial dan sekolah partikelir.

Wijayanti (2019: 13) mengartikan pendidikan sebagai suatu proses bimbingan dan tuntunan yang terdiri dari unsur pendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Pendidikan memiliki keunikan, yakni merupakan bagian kebudayaan, akan tetapi di lain sisi merupakan proses pembudayaan (*enculturation*) yang sifatnya spesifik, berbeda antarmasyarakat (Supardan, 2008: 96). Menurut Nasution (2014: 3), luas dan jenis pendidikan bagi anak-anak bumiputra yang disediakan oleh pemerintah kolonial memiliki tujuan-tujuan politik. Kepentingan pemerintah kolonial terhadap tanah jajahan sangat terlihat jelas dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satu bentuk kepentingan pemerintah kolonial melalui pendidikan adalah untuk menyiapkan tenaga-tenaga terdidik bumiputra yang kelak dipekerjakan dengan gaji rendah. Selain itu, sekolah modern model Barat secara khusus dirancang sebagai sebuah sistem pendidikan dengan

akses terbatas, utamanya bagi kelas-kelas yang memiliki hak istimewa (Budi, 2017: 113).

Terlepas dari tujuan pemerintah kolonial dalam bidang pendidikan untuk mendukung kepentingan kolonialisme di Hindia Belanda yang eksploitatif, pengaruh politik etis terhadap pendidikan mendorong terciptanya cara pandang baru bumiputra terhadap identitas kolektif mereka sebagai entitas yang terjajah. Melalui kesempatan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda, pengetahuan dan kesadaran bumiputra sebagai bangsa mulai tumbuh, yang direpresentasikan melalui berdirinya organisasi-organisasi nasionalis dan sekolah-sekolah partikelir bumiputra.

Sekolah partikelir yang dikelola oleh bumiputra menjadi basis tumbuhnya kesadaran berbangsa di kalangan bumiputra. Dalam konteks ini, pemerintah kolonial menyadari betapa berbahayanya sekolah-sekolah partikelir jika dibiarkan tumbuh secara bebas di Hindia Belanda. Menurut Sulistiyono (2003: 7) ketika terjadi perkembangan di Eropa bahwa negara memberi kebebasan kepada rakyat atau swasta, maka hal sebaliknya justru terjadi di negeri koloni melalui penerapan kebijakan intervensionis oleh pemerintah kolonial dalam bidang politik dan ekonomi. Pada tahun 1932, pemerintah kolonial mengeluarkan *Wilde Scholen Ordonantie* (Ordonansi Sekolah Liar) guna meredam aktivitas sekolah-sekolah partiker bumiputra yang dianggap meyemaikan benih-benih nasionalisme terhadap para siswa bumiputra. Ordonansi Sekolah Liar tentu menindas hak bumiputra untuk menggelar dan mendapatkan pendidikan secara mandiri. Menurut Freire (2011: 17), cara pertama untuk mengatasi penindasan yaitu harus mengenali secara kritis musababnya, dan kemudian melakukan tindakan perubahan yang dapat menciptakan situasi baru.

Ordonansi Sekolah Liar kemudian mendapat penolakan dan penentangan

dari berbagai pihak, salah satunya adalah organisasi nasionalis bernama Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru). Meski PNI Baru bukanlah lembaga pendidikan, akan tetapi organisasi yang didirikan oleh Mohammad Hatta dan Sjahrir pada tahun 1931 tersebut memberikan respon penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Penolakan dan penentangan ini menegaskan garis pemisah antara pemerintah kolonial sebagai penindas dan bumiputra sebagai kelompok yang ditindas, meskipun dalam konteks lain sebetulnya bisa saja berbeda.

Pembahasan mengenai pendidikan masa kolonial masih didominasi oleh pembahasan tentang lembaga-lembaga pendidikan, meskipun terdapat aktor di luar pendidikan yang turut memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan di Hindia Belanda, terutama pendidikan bumiputra. Oleh karena itu, artikel ini berusaha mendedah pergerakan organisasi nasionalis dalam bidang pendidikan melalui aktivisme PNI Baru menentang Ordonansi Sekolah Liar. Pembahasan dalam artikel ini secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian, yaitu membahas mengenai kemunculan dan tujuan Ordonansi Sekolah Liar, aktivisme PNI Baru menentang Ordonansi Sekolah Liar, dan dukungan PNI Baru terhadap Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri Taman Siswa dalam menentang Ordonansi Sekolah Liar di Hindia Belanda.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Terdapat empat tahap dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Menurut Gottschalk (1975: 32) adalah suatu proses menguji dan menganalisa rekaman dan peninggalan masa lampau secara kritis. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari surat kabar sezaman, buku, dan artikel jurnal yang

relevan dengan topik penelitian. Fakta-fakta yang didapat dari sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara kronologis agar dapat menghasilkan historiografi yang representatif.

C. Hasil dan Pembahasan Kelahiran Ordonansi Sekolah Liar

Hasil penelitian dan pembahasan berisi hasil analisis data lapangan yang menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dilatar belakang. Pembahasan menekankan pada hubungan antara pendekatan metode sejarah dan analisis data dan pendekatan teori dan temuan hasil penelitian. Pembahasan dapat disusun dalam subbab-subbab yang terpisah dengan cara penulisan point Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde Scholen Ordonantie*) diumumkan oleh pemerintah kolonial pada September 1932, dan mulai berlaku pada 1 Oktober 1932 (Simbolon, 2008: 732). Pemerintah kolonial mengumumkan pemberlakuan Ordonansi Sekolah Liar bersamaan dengan meningkatnya jumlah sekolah liar dan kelesuan ekonomi akibat depresi ekonomi 1930-an. Melalui Ordonansi Sekolah Liar, pemerintah kolonial memiliki kewenangan mengawasi dan mengeluarkan keputusan terhadap sekolah-sekolah partikelir yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah kolonial dan memberikan pengajaran yang tidak representatif. Lahirnya Ordonansi Sekolah Liar sejalan dengan pemerintah kolonial yang kala itu berada di bawah rezim represif de Jonge. Ia dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang lebih menentang pendidikan partikelir di Hindia Belanda daripada para pendahulunya (Pluiver, 1953: 53).

Secara substansial, Ordonansi Sekolah Liar dapat dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, tentang guru-guru yang harus meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Pemerintah Daerah (Hoofd van Gewestelijk Bestuur) bagi yang akan memberi pengajaran di sekolah partikelir nonsubsidi. *Kedua*, tentang bangunan

sekolah yang harus meminta izin terlebih dahulu karena yang berhak menilai kelayakan bangunan sekolah adalah Kepala Pemerintah Daerah. *Ketiga*, tentang hukuman, bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap Ordonansi Sekolah Liar dapat dihukum selama-lamanya delapan hari atau denda sebanyak-banyaknya f 25. Keempat, tentang aturan perubahan (*overgangsbepalingen*), bahwa para guru yang pada tanggal 1 Oktober 1932 sedang memberi pengajaran sebagaimana tersebut dalam Ordonansi Sekolah Liar, diwajibkan meminta izin dalam tempo enam bulan (Pitut Soeharto & A. Zaenol Ihsan, 1982: 171).

Sebelum pemberlakuan Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932, pemerintah kolonial sudah memberlakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah partikelir pada tahun 1923 melalui penerapan Ordonansi No. 134, yang kemudian setelah diberlakukannya ordonansi tersebut muncul istilah “sekolah-sekolah liar partikelir” untuk menyebut sekolah partikelir. Salah satu alasan penyebutan sekolah partikelir dengan istilah “sekolah liar” oleh pemerintah adalah karena kurikulum yang digunakan tidak seragam (Wiryopranoto, 2017: 21). Lebih dari itu, kemunculan sekolah-sekolah partikelir bumiputra dianggap membahayakan oleh pemerintah kolonial bagi kepentingan mereka di tanah jajahan. Melalui penerapan Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932 inilah bukti kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap sekolah-sekolah partikelir semakin terlihat.

Selain dianggap membahayakan stabilitas politik pemerintah kolonial karena sebagian sekolah partikelir berperan sebagai penebar benih nasionalisme, pertumbuhan sekolah partikelir pada awal tahun 1930-an telah memberatkan keuangan pemerintah kolonial melalui subsidi yang dikeluarkan untuk sekolah-sekolah yang terdaftar. Tahun-tahun sebelumnya yang telah

memberi banyak keuntungan ekonomi bagi pemerintah kolonial tidak berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan di Hindia Belanda, terlebih pada masa depresi ekonomi 1930-an ketika ekonomi Hindia Belanda merosot dan harus dilakukan penghematan. Pada tahun 1932, anggaran pendidikan pemerintah kolonial dipangkas, dan terus terjadi hingga tahun-tahun berikutnya (Prastama, 2017: 28). Dalam hal ini, sekolah partikelir menjadi pihak yang paling dirugikan di tengah usaha pemerintah kolonial melakukan pembatasan dan penghematan atau efisiensi dalam bidang pendidikan. Depresi ekonomi tidak hanya menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan, tetapi juga memaksa pemerintah untuk menutup sejumlah HIK (*Hollands Inlandse Kweekschool*) dan sekolah umum lainnya, serta mencari jenis sekolah yang tidak terlalu menekan anggaran pemerintah (Suwignyo, 2012: 46). Meski demikian, hanya sekolah-sekolah partikelir yang tidak terdaftar atau tidak menerima bantuan pemerintah kolonial saja seperti Taman Siswa yang disasar Ordonansi Sekolah Liar.

Pada awal tahun 1932, sekolah liar tercatat berjumlah 550 sekolah (*Algemeen Handelsblad*, 18 Maret 1932: 7). Jumlah tersebut memungkinkan dapat terus meningkat selama awal tahun 1930-an karena beriringan dengan meningkatnya kesadaran nasional dan aktivisme organisasi-organisasi nasionalis yang sadar terhadap pentingnya pendidikan bagi bumiputra. Demikian pula pergerakan nasional pada periode awal 1930-an yang mengalami peningkatan aktivitas, ditandai dengan berdirinya dua organisasi nasionalis nonkooperatif baru, yaitu Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru).

Di sisi lain, meningkatnya jumlah sekolah partikelir didorong pula oleh latar belakang semata-mata untuk mencari makan, terlebih Hindia Belanda pada awal tahun 1930-an sedang dihantam depresi

ekonomi (Tsuchiya, 2019: 254). Depresi ekonomi menyebabkan banyak guru bumiputra berpendidikan Belanda tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap di sekolah negeri seperti yang diharapkan, mereka harus mencari pekerjaan di sekolah partikelir, termasuk di sekolah nasionalis yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai “sekolah tidak resmi” atau “sekolah liar” (Suwignyo, 2012: 46). Surat kabar *Algemeen Handelsblad* (18 Maret 1932: 7) mewartakan bahwa sekolah liar telah menjadi objek keuntungan bagi pengusaha yang gagal di bidang lain. Seorang bernama Cornelis di Batavia memiliki enam belas sekolah dengan tiga ribu siswa, lebih dari 81 guru, dan 65 di antaranya tidak memiliki izin. Atas dasar tersebut, terdapat dua latar belakang peningkatan jumlah sekolah partikelir, yaitu bertujuan untuk memperbaiki penghidupan bumiputra dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata.

Jika melihat tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial atas pemberlakuan Ordonansi Sekolah Liar, maka kekhawatiran pemerintah terhadap penyebaran gagasan nasionalisme merupakan alasan yang relevan karena propaganda nasionalisme dalam sekolah-sekolah partikelir dapat menjadi katalisator tumbuhnya nasionalisme di kalangan bumiputra. Alasan dan sikap pemerintah kolonial tersebut tentu mengundang respon bumiputra, yang tidak hanya dari kalangan yang bergiat di bidang pendidikan, tetapi juga kalangan nasionalis yang aktif dalam organisasi pergerakan nasional.

PNI Baru Menentang Ordonansi Sekolah Liar

Ordonansi Sekolah Liar mendapat perhatian tidak hanya dari kalangan terpelajar yang aktif dalam kegiatan pengajaran sekolah partikelir, tetapi juga dari organisasi-organisasi nasionalis nonkooperasi, sebagaimana yang ditunjukkan oleh PNI Baru. Dalam

beberapa kesempatan, PNI Baru menentang Ordonansi Sekolah Liar melalui tulisan-tulisan yang terbit dalam *Daulat Ra'jat*, rapat umum, dan aksi-aksi secara terbuka. Oleh karena itu, dalam pembahasan bagian ini terdapat tiga poin utama sebagai bentuk penentangan PNI Baru terhadap Ordonansi Sekolah Liar.

PNI Baru merupakan organisasi nasionalis nonkooperasi berbasis pendidikan kader. Salah satu media pendidikan kader yang dimiliki PNI Baru adalah majalah bernama *Daulat Ra'jat* yang terbit pada tahun 1931-1934. Namun, *Daulat Ra'jat* secara konten tidak hanya memuat teori-teori yang bersifat edukatif, terdapat pula tulisan-tulisan yang menunjukkan sikap politik PNI Baru sebagai respon terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul pada awal periode 1930-an. Kedudukan *Daulat Ra'jat* sebagai pers PNI Baru tentu dianggap penting, kaitannya dengan penyebarluasan ide-ide nasionalisme dan sikap PNI Baru. Menurut Suroyo (2002: 9) perjuangan modern tidak dapat dipisahkan dari peranan media massa sebagai alat propaganda dan mobilisasi. Selain itu, di negeri yang tidak merdeka, surat kabar menjadi pembantu atau senjata kaum pergerakan dan kaum reaksioner (*Fikiran Ra'jat*, 28 Oktober 1932: 6).

Soetan Sjahrir menggunakan nama samaran Realpolitiker menerbitkan sebuah tulisan dalam *Daulat Ra'jat* berjudul “Menentang Ordonantie Sekolah Liar” pada 30 November 1932 awal, yang menandakan awal penentangan PNI Baru terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Tulisan tersebut merepresentasikan keberatan PNI Baru atas penerapan Ordonansi Sekolah Liar, seperti halnya Taman Siswa dan Muhammadiyah, dua organisasi yang aktif di bidang pendidikan. Disebutkan pula dalam tulisan tersebut bahwa Ordonansi Sekolah Liar telah membangunkan perhatian politik bumiputra untuk melakukan penentangan (*Daulat Ra'jat*, 30 November 1932: 1).

Dua bulan setelah tulisan Realpolitiker terbit, *Daulat Ra'jat* menerbitkan sebuah tulisan berjudul “Ordonansi Sekolah ‘Liar’” pada 10 Januari 1933. Secara eksplisit dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa cara imperialisme menjalankan penjajahan adalah dengan melakukan taktik *domhouden van de massa* atau membiarkan rakyat jelata dalam kebodohan. Cara seperti itulah yang dilakukan pemerintah kolonial melalui Ordonansi Sekolah Liar. Oleh karena itu, muncul pertentangan yang diinisiasi oleh bumiputra objek pembodohan. Di dalam tulisan tersebut turut diserukan suara-suara pertentangan terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Salah satu yang paling kentara adalah kalimat di akhir tulisan, yaitu “Oleh karena itu Ra'jat Indonesia toendjoekkanlah kesadaranmu, dan tegoehkanlah pendirianmoe!” (*Daulat Ra'jat*, 10 Januari 1933: 7).

PNI Baru turut menyuarakan sikap penentangan terhadap Ordonansi Sekolah Liar dalam rapat-rapat yang digelar oleh Pimpinan Umum PNI Baru dan para kader PNI Baru. Inoe Perbata Sari dalam Rapat Umum PNI Baru Menentang Ordonansi Sekolah Liar yang digelar di Bandung, menyampaikan beberapa pandangannya mengenai pendidikan bumiputra di Hindia Belanda melalui pidatonya yang berjudul “Pendidikan atau Onderwijs Nasional: Arti dan Goenanja.” Menurutnya, sebagai rakyat jajahan, pendidikan penting untuk kemajuan bangsa, akan tetapi kaum kapitalisme dan imperialisme membiarkan rakyat bumiputra berada dalam kebodohan dan kegelapan agar dapat dengan mudah diperintah (*Daulat Ra'jat*, 10 Februari 1933: 29). Selain itu, pendidikan yang dijalankan melalui sekolah-sekolah pemerintah, sekadar untuk memenuhi kebutuhan kaum kapitalis dan imperialis. Inoe Perbata Sari decara eksplisit dalam pidatonya banyak menyoroti ketidakadilan pendidikan di Hindia Belanda yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial.

Tidak hanya sekadar melakukan penentangan melalui tulisan yang terbit dalam *Daulat Ra'jat* dan menggelar rapat menentang Ordonansi Sekolah Liar, PNI Baru menunjukkan langkah-langkah konkret yang lebih kompleks. Mohammad Hatta sebagai Pemimpin PNI Baru menganjurkan untuk mengkonsolidasikan aksi pembangkangan yang sedang terjadi pada saat itu (Muljana, 2008: 111). Anjuran Hatta kemudian diaktualisasikan dengan melakukan aksi gabungan yang terdiri dari berbagai organisasi nasionalis di penghujung tahun 1932. Aksi berlangsung di beberapa daerah di Jawa, di antaranya Batavia, Bandung, Surabaya, Sukabumi, Cimahi, Semarang, Solo, Garut, Jogja, dan lainnya. Dalam sebuah aksi di Sukabumi, Mohammad Hatta berpidato di depan enam ratus orang (*Bataviaasch nieuwsblad*, 13 Desember 1932). Sebelumnya, pada tahun 1932 di Sukabumi, PNI Baru bersama Partindo dan Pasoendan mendirikan suatu badan untuk mengadakan aksi protes terhadap Ordonansi Sekolah Liar (*Fikiran Ra'jat*, 4 November 1932: 15).

Aksi kemudian berlanjut hingga awal tahun 1933. Di Jogja, beberapa organisasi seperti PNI Baru, Partindo, Muhammadiyah, dan organisasi bumiputra lainnya menggelar aksi protes Ordonansi Sekolah Liar pada Februari 1933. Pada bulan yang sama, PNI Baru mengadakan pertemuan di Kangeran dan Klaten sebagai bentuk protes terhadap Ordonansi Sekolah Liar (*Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië*, 7 Februari 1933). Aksi protes dilakukan dalam dua bentuk, aksi terbuka dan aksi diam-diam melalui rapat-rapat antarorganisasi sebagai usaha konsolidasi aksi. Aksi secara diam-diam dilakukan karena tidak menutup kemungkinan untuk mengantisipasi pergerakan *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) yang berusaha mengawasi segala aktivisme organisasi nasionalis.

Di sisi lain, aksi protes yang dilakukan PNI Baru bersama organisasi nasionalis

lainnya menjadi sebuah gambaran bahwa aksi protes Ordonansi Sekolah Liar telah menyatukan organisasi-organisasi nasionalis yang sejauh itu sering terlibat dalam kontestasi politik. PNI Baru dan Partindo yang seringkali berseberangan pandangan dan pergerakan, dalam kesempatan tersebut secara bersamaan turut bergabung dalam aksi-aksi protes Ordonansi Sekolah Liar, meskipun hanya bersifat sementara. Hal tersebut ditunjukkan melalui berdirinya komite-komite untuk menentang Ordinansi Sekolah Liar, yang di dalamnya terdapat wakil-wakil dari berbagai organisasi, termasuk PNI Baru dan Partindo (Surjomihardjo, 1986: 115). Aksi tersebut telah membentuk kesadaran di kalangan organisasi politik dan non-politik untuk bekerja sama, yang semula diperkirakan tidak mungkin terjadi (Purwoko, 1994: 132). Dalam hal ini, PNI Baru dan organisasi bumiputra lainnya menunjukkan bahwa pemerintah kolonial dengan Ordonansi Sekolah Liar merupakan musuh bersama bagi bumiputra dan harus ditentang.

Dukungan PNI Baru terhadap Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa

Penerapan Ordonansi Sekolah Liar dianggap merugikan berbagai kalangan yang aktif dalam bidang pendidikan dan pergerakan nasional. Taman Siswa adalah salah satu lembaga pendidikan bumiputra terbesar di Hindia Belanda sangat menentang Ordonansi Sekolah Liar. Pengaruh Taman Siswa terhadap pendidikan bumiputra sangat kentara, sehingga dalam aksi menentang Ordonansi Sekolah Liar menunjukkan langkah-langkah yang progresif, bahkan menjadi rujukan organisasi-organisasi bumiputra dalam melakukan aksi penentangan tersebut. Ki Hajar Dewantara, pendiri sekaligus pemimpin Taman Siswa menjadi tokoh penting selama aksi penentangan Ordonansi Sekolah Liar. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa Taman

Siswa dan Wanita Taman Siswa melawan Ordonansi Sekolah Liar dengan cara Satyagraha atau perlawanan dengan tenaga diam (Anwar & Yulifar, 2019: 182). Cara perlawanan tersebut dikenal pula dengan istilah perlawanan pasif (*Ijdelijk verzet*). Pemerintah kolonial sangat khawatir dengan perlawanan pasif yang digagas Ki Hajar Dewantara (Surjomihardjo, 1986: 107). Dalam waktu singkat, langkah dan pendirian Ki Hajar Dewantara dalam menentang Ordonansi Sekolah Liar diikuti oleh berbagai organisasi politik dan pendidikan lainnya (Abdullah, 2018: 272).

PNI Baru turut ambil bagian mendukung langkah-langkah yang dilakukan Taman Siswa terkait usaha menentang Ordonansi Sekolah Liar. Selain ikut dalam aksi gabungan, PNI Baru menunjukkan dukungan terhadap Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam menentang Ordonansi Sekolah Liar melalui penerbitan maklumat dari Ki Hajar Dewantara. Maklumat tersebut diterbitkan *Daulat Ra'jat* pada 10 Maret 1933. Ki Hajar Dewantara melalui maklumatnya menyebutkan bahwa ia menuntut dihapuskannya sifat preventif dalam Ordonansi Sekolah Liar, yang dianggap sangat berbahaya karena adanya substansi tentang "permintaan izin" (*Daulat Ra'jat*, 10 Maret 1933: 51). Preventif dalam hal ini adalah permintaan izin bumiputra atau sekolah partikelir untuk memberikan pengajaran dapat ditolak oleh pemerintah.

Penyebarluasan maklumat dari Ki Hajar Dewantara melalui *Daulat Ra'jat* dapat memberikan pemahaman kepada para kader PNI Baru mengenai konstelasi dan sikap kelompok nasionalis terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Pers dalam hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh PNI Baru sebagai media perjuangan menentang Ordonansi Sekolah Liar, serta dukungan terhadap aksi-aksi Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa. Meskipun masih bersifat terbatas, setidaknya apa yang dilakukan oleh PNI Baru tersebut dapat memberi

pengaruh terhadap konstelasi pergerakan menentang Ordonansi Sekolah Liar.

Penerbitan maklumat dari Ki Hajar Dewantara oleh PNI Baru semata-mata bukan sekadar bentuk solidaritas terhadap aksi-aksi yang dilakukan Ki Hajar Dewantara, tetapi juga merepresentasikan dukungan PNI Baru terhadap penentangan Ordonansi Sekolah Liar dan menunjukkan pula kesamaan pandangan PNI Baru terhadap Ordonansi Sekolah Liar. Tentu hal ini sesuai dengan dasar pergerakan PNI Baru yang memfokuskan pergerakan pada pendidikan kader serta pendidikan bumiputra secara umum di Hindia Belanda. PNI Baru mengarahkan pergerakannya untuk menanamkan jiwa kebangsaan dan semangat nasionalisme Indonesia di dalam hati-sanubari rakyat melalui pendidikan (Sagimun, 1988: 293). Oleh karena itu, langkah yang diambil oleh PNI Baru menunjukkan dukungan terhadap Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa yang merupakan corong pendidikan bumiputra.

Ordonansi Sekolah Liar akhirnya dicabut pada Februari 1933 melalui Keputusan Gubernur Jenderal (Ricklefs, 2011: 286). Upaya keras yang dilakukan oleh seluruh kalangan nasionalis berhasil menekan pemerintah kolonial untuk membatalkan Ordonansi Sekolah Liar. Tentu keberhasilan tersebut diperoleh karena adanya unsur kerja sama dan solidaritas yang erat antarorganisasi atau kelompok bumiputra yang secara konsisten menunjukkan penentangan atau penolakan terhadap Ordonansi Sekolah Liar, sekaligus menunjukkan intensitas pergerakan nasional yang masih konsisten di awal tahun 1930-an.

D. Kesimpulan

Di balik alasan kualitas pengajaran yang buruk, sekolah partikelir yang dikelola oleh bumiputra dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial karena menyemai benih-benih nasionalisme.

Ordonansi Sekolah Liar yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada tahun 1932 bertujuan untuk membungkam sekolah partikelir, yang kemudian ditentang oleh beragam elemen bumiputra, tidak hanya lembaga-lembaga pendidikan, tetapi juga organisasi-organisasi pergerakan nasional. PNI Baru sebagai organisasi pergerakan melakukan penentangan terhadap Ordonansi Sekolah Liar melalui tiga cara, yaitu menentang melalui tulisan-tulisan yang terbit dalam *Daulat Ra'jat*, menggelar rapat umum menentang Ordonansi Sekolah Liar yang dihadiri oleh internal PNI Baru, dan melakukan aksi protes secara terbuka bersama dengan organisasi-organisasi lainnya melalui komite-komite yang tersebar di berbagai daerah. Usaha PNI Baru menentang Ordonansi Sekolah Liar juga merepresentasikan dukungan terhadap pergerakan Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa sebagai tokoh pendidikan dan lembaga pendidikan bumiputra paling berpengaruh pada saat itu. Dukungan PNI Baru terhadap Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa merupakan bentuk solidaritas kebangsaan yang terus meningkat pada awal tahun 1930-an. Inisiatif yang dilakukan PNI Baru tersebut menunjukkan bahwa sebagai organisasi yang bersifat politis, PNI Baru turut memberikan perhatian terhadap dinamika pendidikan bumiputra di Hindia Belanda. Hal tersebut tidak terlepas dari dasar pergerakan PNI Baru yang mengutamakan pendidikan kader.

E. Daftar Pustaka

- Abdullah, T. (2018). *Sekolah & Politik: Pergerakan Kaum Muda di Sumatra Barat, 1927-1933*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Algemeen Handelsblad, 18 Maret 1932.
- Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 7 Februari 1933.
- Anwar, R.L.I. & Yulifar L. (2019). *Peranan Raden Ajeng Sutartinah*

- dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan untuk Perempuan melalui Organisasi Wanita Tamansiswa Tahun 1922-1971. *FACTUM*, Vol. 8 No. 2 (pp. 171-186).
- Bataviaasch nieuwsblad, 13 Desember 1932.
- Budi, L.S. (2017). Bersekolah di Tanah Pengasingan: Boven Digoel, 1927-1943. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 2, 2017, (pp. 112-125)
- Daulat Ra'jat, 30 November 1932.
- Daulat Ra'jat, 10 Januari 1933.
- Daulat Ra'jat, 10 Februari 1933.
- Daulat Ra'jat, 10 Maret 1933.
- Fikiran Ra'jat, 28 Oktober 1932.
- Fikiran Ra'jat, 4 November 1932
- Freire, P. (2011). *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: LP3ES.
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Mulyana, S. (2008). *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan Jilid I*. Yogyakarta: LkiS.
- Nasution. (2014). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pluiver, J.M. (1953). *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesië, in de jaren 1930 tot 1942*. 'S-Gravenhage, Bandung: N.V. Uitgeverij W. Van Hoeve.
- Prastama, B. (2017). The Respons of Teachers Union in Central Java Against the Politics of Colonial Education (1930-1942). In Sri Margana, Baha'Uddin, & Ahmad Faisol (Eds). *Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Purwoko, D. (1994). Semangat Taman Siswa dalam Perlawanannya Terhadap Undang-undang Sekolah Liar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (pp. 125-135).
- Ricklefs, M.C. (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sagimun, MD. (1988). *Jakarta dari Tepian Air ke Kota Proklamasi*. Jakarta: Dinas Museum dan Sejarah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Simbolon, P. T. (2008). *Menjadi Indonesia: Akar-akar Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sulistiyono, S.T. (2002). *Refleksi 95 Tahun Kebangkitan Nasional: Perlunya Kesadaran Rakyat Menuju Indonesia Mandiri*. (Makalah disampaikan pada Diskusi Bersama, Refleksi Pergerakan 20 Mei 1908, Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang: 28 Mei 2003).
- Supardan, D. (2008). *Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis. Generasi Kampus*, Vol. 1 No. 2, (pp. 96-106).
- Surjomihardjo, A. (1986). *Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Suroyo, A.M.D. (2002). *Integrasi Nasional dalam Perspektif Sejarah Indonesia: Sebuah Proses yang Belum Selesai*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang 9 Februari 2002).
- Suryopranoto, S. (2017). *Gagasan Ki Hajar Dewantara di Bidang Politik*. In Djoko Marhandono (Ed.). *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional.
- Suwignyo, A. (2012). *The Breach in the Dike: Regime Change and the Standardization of Public Primaryschool Teacher Training in*

- Indonesia, 1893-1969. (Doctoral dissertation. Leiden University).
- Tsuchiya, K. (2019). *Demokrasi dan Kepemimpinan: Kebangkitan Gerakan Taman Siswa*. Jakarta: Balai Pustaka & Kepustakaan Populer Gramedia.
- Wijayanti, D. (2019). *Pendidikan Multikultural: Teori, Urgensi, dan Solusi Permasalahan Pendidikan di Indonesia*. Pemalang: Dramaturgi.